



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 55 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2023.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Dinas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

**BAB II**

**SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

**Pasal 2**

Renja Dinas Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2023 dan hasil evaluasi Renja Dinas tahun lalu.

**Pasal 3**

- (1) Renja Dinas Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Dinas Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Dinas Tahun Anggaran 2023.

**BAB III****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022  
B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 28 - 7 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2022 NOMOR 55**



**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 1 ayat 30, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Pasal 13 ayat 2 dijelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan



fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda Kabupaten Garut dan pemangku kepentingan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 16 ayat 2, proses penyusunan Renja melalui tahapan sebagai berikut:

- (i) persiapan penyusunan;
- (ii) penyusunan rancangan awal;
- (iii) penyusunan rancangan;
- (iv) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- (v) perumusan rancangan akhir
- (vi) penetapan.

Tahap persiapan penyusunan Renja meliputi: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2023, orientasi dan penyusunan agenda kerja tim difasilitasi oleh Bappeda.



Tahapan persiapan ini dilaksanakan pada bulan November 2021.

Selanjutnya tahap penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Sesuai dengan pasal 126, rancangan awal ini berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2022 (n-1). Sesuai dengan pasal 126 ini juga penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat minggu pertama Bulan Desember. Sehingga untuk rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023, direncanakan selesai minggu pertama bulan Desember 2021. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra Perangkat Daerah. Sedangkan evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dapat mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Sehingga rancangan awal Renja ini mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Tahap ketiga dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun

2023 adalah tahap penyusunan rancangan. Penyusunan rancangan merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Rancangan Renja ini kemudian disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi oleh tim dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja ini disampaikan ke Bappeda paling lambat minggu ketiga bulan Maret 2022.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 136 ayat 1, dijelaskan bahwa Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku

kepentingan yang menghadiri forum Gabungan Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir merupakan tahap selanjutnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.

Perumusan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Sistematika penyajian rancangan akhir Renja sama dengan rancangan awal Renja. Tahap akhir dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah tahap penetapan. Rancangan akhir Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi oleh tim, paling lambat satu minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan. Setelah diverifikasi dan disempurnakan kembali oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, rancangan akhir Renja diserahkan kembali ke Bappeda untuk diajukan penetapannya paling lambat satu bulan setelah Perkada RKPD ditetapkan.

Setiap tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terlepas dari tahapan proses penyusunan RKPD Pemerintah Daerah. Rancangan awal Renja



Perangkat Daerah merupakan bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD setelah penyempurnaan berdasarkan konsultasi publik merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kesesuaian dan keselarasannya dengan rancangan awal RKPD, merupakan bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan akhir RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja diverifikasi keselarasannya dengan perkara tentang RKPD oleh Bappeda, untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

RKPD Tahun 2023 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang secara langsung atau tidak langsung akan berkontribusi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya sebagai salah satu Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut Tahun 2023 dengan tema “ Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah Serta

Penguatan Demokrasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Seperti halnya RKPD 2023, maka Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 ini akan menjadi Rencana Kerja Tahun ke-4 dan harus menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode tahun 2019-2024. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut ini selanjutnya juga akan ditindak lanjuti sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD yaitu, RKA, KUA/PPAS dan RAPBD.

Tujuan penyusunan Renja Tahun 2023 adalah sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam pelaksanaan kegiatannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara





Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa



- Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);



29. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 255 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) adalah menetapkan program dan kegiatan agar senantiasa sesuai dengan kinerja yang ingin dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.





**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN LALU**

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPMD, Analisis Kinerja Pelayanan DPMD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD, Review terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, serta Program dan Kegiatan.

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH**

Memuat rencana kerja dan pendanaan anggaran DPMD.

**BAB V. PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

**LAMPIRAN** Melampirkan data dan informasi yang mendukung pemaparan Renja.



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2021 beserta target dan capaian renstra adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.1**  
**TARGET DAN REALISASI SASARAN STRATEGIS 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Jumlah Desa Yang Meningkatkan Status Pembangunannya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	94,77%	100%	105,5%

SUMBER : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMD KAB.GARUT TAHUN 2021

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Jumlah Desa Yang Meningkatkan Status Pembangunannya” diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang”.

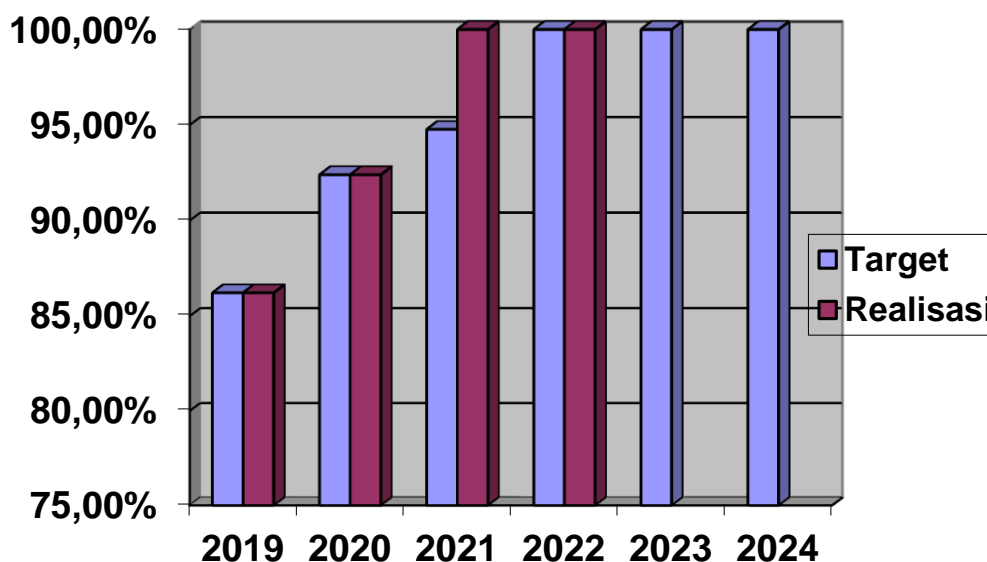
Dari hasil perhitungan, disimpulkan bahwa realisasi IKU “Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang” sebesar



100% atau mencapai 105,5% dari target tahun 2021 sebesar 94,77%.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra DPMD periode 2019-2024 disajikan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 1**  
**dengan Target Tahun 2021**



Pencapaian sasaran strategis 1 didukung oleh 4 Program, 4 Kegiatan dan 22 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 14.612.477.878,00 dan terealisasi Rp. 14.022.955.239,00 (95,97%).



**TABEL 2.2**  
**TARGET DAN REALISASI SASARAN STRATEGIS 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Kapasitas Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,070 poin	82,954 poin	99,86%

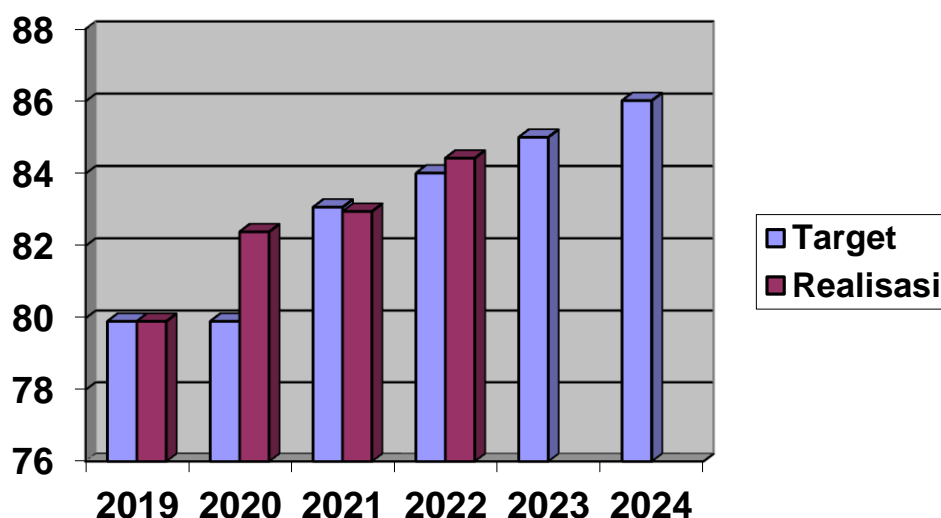
SUMBER : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DPMD KAB.GARUT TAHUN 2021

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kapasitas Kinerja SKPD ” diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

Dari hasil perhitungan, disimpulkan bahwa realisasi IKU “Indeks Kepuasan Masyarakat” sebesar 82,954 poin atau mencapai 99,86% dari target tahun 2021 sebesar 83,070 poin.

Perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra DPMD periode 2019-2024 disajikan dalam gambar 2.2 sebagai berikut:

**Gambar 2.2**  
**Perbandingan Realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 2 dengan Target Tahun 2021**





Pencapaian sasaran strategis 2 didukung oleh 1 Program, 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 6.768.402.871,00 dan terealisasi Rp. 6.258.441.881,00 (92,47%).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :



**TABEL 2.3**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa s/d Tahun 2022 Kabupaten Garut**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan desa dan program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan SKPD Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
2 13 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pemenuhan Kualitas Sumber Daya Aparatur	84,013	83,070	83,070	83,070	100	84,013	84,013	100
2 13 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Serta dokumen Laporan capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2 13 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 Dokumen	21 Dokumen	300
2 13 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 Dokumen	12 Dokumen	300
2 13 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	15 Dokumen	300



2	13	01	2,02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu</b>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
2	13	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	300
2	13	01	2,03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Pengamanan Barang Milik Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
2	13	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Tenaga Keamanan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100	4 Orang	12 Orang	
2	13	01	2,05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tingkat pemenuhan disiplin aparatur DPMD</b>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
2	13	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah jenis pakaian dinas pegawai DPMD	3 Jenis				100	2 jenis	2 Jenis	67
2	13	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai DPMD yang mendapatkan peningkatan kompetensi	75 Orang				100	75 orang	75 Orang	100
2	13	01	2,06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</b>	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
2	13	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah ruang yang tersedia untuk penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan	14 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis	18 Jenis	129



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	58 Jenis 4 Jenis	43 Jenis 3 Unit	43 Jenis 3 Unit	43 Jenis 3 Unit	100	7 jenis	43 Jenis	74
2	13	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan	18 jenis	10 Jenis, 39917 Lembar	10 Jenis, 39917 Lembar	10 Jenis, 39917 Lembar	100	89946 Imbr 6 jenis	16 Jenis	89
2	13	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	192 eksemplar	5 Kali 192 Eksemplar	5 Kali 192 Eksemplar	5 Kali 192 Eksemplar	100	600 Eksemplar	984 Eksemplar	513
2	13	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan minuman tamu	1440 Box	604 Box	604 Box	604 Box	100	720 box	1928 Box	134
2	13	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman bagi peserta rapat Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12.00 Bulan 600 Box	12 Bulan 12 Bulan 398 Box	12 Bulan 12 Bulan 398 Box	12 Bulan 12 Bulan 398 Box	100	1236 box 12 bulan	36 Bulan, 2032 Box	300
2	13	01	2,07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2	13	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas (Mobil, Motor)	2 Jenis					-		
2	13	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana Penunjang Pelayanan Publik	2 Jenis					-		
2	13	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebeler sarana penunjang aparatur	2 Jenis					2 jenis	2 jenis	100
2	13	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya	5 Jenis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	2 jenis	4 Jenis	80
2	13	01	2,08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2	13	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan bukti pembayaran rekening telpon, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300





RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	2 jenis	8 Jenis	267
2	13	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan	4 Orang	4 Orang	4 Orang	4 Orang	100	4 Orang	12 Orang	300
2	13	01	2,09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2	13	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terawat	29 Unit	23 Unit	23 Unit	23 Unit	100	29 Unit 29 Unit	75 Unit	259
2	13	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor DPMD	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100	-	2 Gedung	200
2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase peningkatan keswadayaan masyarakat</b>	<b>10%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>100</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>100</b>
2	13	02	2,01		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2	13	02	2,01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Data hasil evaluasi rencana pemekaran	1 Laporan 1 Perda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	300
2	13	02	2,01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan infrastruktur perdesaan) Jumlah desa yang dimonitoring (peningkatan sarana prasarana desa) Jumlah peserta bimtek peningkatan	210 desa 20 desa 462 orang	211 desa 15 desa 462 orang	211 desa 15 desa 462 orang	211 desa 15 desa 462 orang	100	210 desa, 20 desa, 421 orang	421 desa, 50 desa, 462 orang	200



2	13	02	2,01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah sarana prasarana yang dibangun (BSMSS) Jumlah sarana prasarana yang dibangun (TNI)	2 Kegiatan 4 Kegiatan	2 Kegiatan 4 Kegiatan	2 Kegiatan 4 Kegiatan	2 Kegiatan 4 Kegiatan	100	1 Kegiatan 1 Kegiatan	5 Kegiatan 9 Kegiatan	250
2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,55%</b>	<b>100</b>	<b>1,66%</b>	<b>1,66%</b>	<b>100</b>
2	13	03	2,01		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya</b>	<b>37,05%</b>	<b>35,93%</b>	<b>35,93%</b>	<b>35,93%</b>	<b>100</b>	<b>37,05%</b>	<b>37,05%</b>	<b>100</b>
2	13	03	2,01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok usaha masyarakat	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	10 kelompok	100	10 Kelompok	30 Kelompok	300
2	13	03	2,01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah kawasan perdesaan yang dibentuk dan dikembangkan	2 kawasan perdesaan	2 kawasan perdesaan	2 kawasan perdesaan	2 kawasan perdesaan	100	2 kawasan Perdesaan	2 kawasan Perdesaan	100
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel</b>	<b>60%</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>100</b>
2	13	04	2,01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2	13	04	2,01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina tentang penyelenggaraan pemerintahan desa	421 desa	421 desa	421 desa	421 desa	100	421 Desa	421 Desa	100
2	13	04	2,01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah peserta sosialisasi	1263 Orang	842 Orang	842 Orang	842 Orang	100	842 Orang	842 Orang	67
2	13	04	2,01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah peserta bimtek	670 Orang	140 Orang	140 Orang	140 Orang	100	42 Orang	322 Orang	48



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	04	2,01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang di monitoring tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	421 Desa	421 Desa	421 Desa	421 Desa	100	-	421 Desa	100
2	13	04	2,01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah kader pembangunan manusia yang di bina Jumlah kajian desa wisata Jumlah kelompok yang dibina Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang mendapatkan jaminan kesehatan Jumlah peserta bimtek Inventarisasi sumber daya alam Jumlah peserta bimtek Siskeudes Jumlah peserta peningkatan kapasitas pengelola sarana penyediaan Air Minum dan Sanitasi	1684 Orang 84 Orang 36 Kelompok 4631 Orang 60 Orang 211 Orang 140 Orang 75 Orang	84 Desa 84 Orang 36 Kelompok 4631 Orang 60 Orang 211 Orang 140 Orang 75 Orang	84 Desa 84 Orang 36 Kelompok 4631 Orang 60 Orang 211 Orang 140 Orang 75 Orang	84 Desa 84 Orang 36 Kelompok 4631 Orang 60 Orang 211 Orang 140 Orang 75 Orang	100	42 Orang 21 Kajian 36 Kelompok 4631 Orang 211 Orang 280 Orang 75 Orang	210 Orang 21 Kajian 36 Kelompok 4631 Orang 211 Orang 280 Orang 225 Orang	12
2	13	04	2,01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dimonitoring Jumlah bumdes yang mendapatkan penguatan Jumlah lembaga bumdes bersama yang baru dibentuk	100 BUMDes 150 orang 10 Bumdes	100 BUMDes 588 orang 10 Bumdes	100 BUMDes 588 orang 10 Bumdes	100 BUMDes 588 orang 10 Bumdes	100	100 Bumdes 41 orang 10 Bumdes	300 Bumdes 588 orang 30 Bumdes	300
2	13	04	2,01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa pelaksana pilkades yang dimonitoring Jumlah desa yang mengikuti pilkades Jumlah Kepala Desa yang dilantik			217 Desa 217 Desa 217 Orang	217 Desa 217 Desa 217 Orang	100	-	217 Desa 217 Desa 217 Orang	100
2	13	04	2,01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dokumen Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	300



2	13	04	2,01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen perguliran aset ex PNPM MPd	1 Dokumen 421 desa	1 Dokumen 421 desa	1 Dokumen 421 desa	1 Dokumen 421 desa	100	1 Dokumen	3 Dokumen	300
2	13	04	2,01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan tentang penataan dan penegasan batas desa	15 desa 1 Perbup	84 Desa	84 Desa	84 Desa	100	84 Desa	84 Desa	560
2	13	04	2,01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen evaluasi perkembangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	300
2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2	13	05	2,01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan	<b>8,26%</b>	<b>5,50%</b>	<b>5,50%</b>	<b>5,50%</b>	<b>100</b>	<b>8.26%</b>	<b>8.26%</b>	<b>100</b>
2	13	05	2,01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga adat yang dibina	2 Lembaga Adat	2 Lembaga Adat	2 Lembaga Adat	2 Lembaga Adat	100	-	4 Lembaga Adat	200



2	13	05	2,01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Juara Lomba Posyandu Juara Olimpiade kader posyandu Jumlah perda yang dicabut Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu	6 Posyandu 2000 Orang 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	6 Posyandu 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	6 Posyandu 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	6 Posyandu 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	100	6 Posyandu 6 Orang 1 Perda 442 Kader Posyandu	18 Posyandu 1326 Orang 442 Kader posyandu 42 Pokjanal Kecamatan	300
2	13	05	2,01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Gelar Produk Unggulan Desa Tingkat Kabupaten dan Provinsi Jumlah alat penunjang produksi Jumlah kelompok usaha masyarakat Jumlah pendampingan desa emas Kelompok usaha ekonomi yang mempunyai sertifikasi produksi	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUMDes 3 Desa 100 Kelompok Usaha	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUMDes 3 Desa 100 Kelompok Usaha	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUMDes 3 Desa 100 Kelompok Usaha	2 Kali 42 Unit 6 Kelompok BUMDes 3 Desa 100 Kelompok Usaha	100	2 kali, 42 Unit, 6 kelompok BUMDES, 3 Desa, 100 kelompok usaha	6 Kali 42 Unit 18 Kelompok BUMDes 9 Desa 100 Kelompok Usaha	300
2	13	05	2,01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional Jumlah peserta bimtek inovasi Alat TTG	3 kali 153 orang	3 kali 134 orang	3 kali 134 orang	3 kali 134 orang	100	2 Kali 153 Orang	8 Kali 421 Orang	267
2	13	05	2,01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Desa Juara Pelaksana BBGRM Terbaik dan Pelaksanaan Pencanangan BBGRM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	100	1 Desa	3 Desa	300



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	05	2,01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jambore Kader Jumlah Peserta Bimtek TP PKK Desa Jumlah Peserta Bina Wilayah Jumlah Peserta Pelatihan Kader Dasa wisma Jumlah Peserta Pelatihan Kepemimpinan TP3PKK Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Kader PKK Jumlah peserta rapat koordinasi Jumlah Peserta Rapat Rutin TP PKK Kabupaten Lomba 10 Program PKK	6 Juara 227 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	6 Juara 134 TP PKK Desa 42 Kecamatan 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	100	6 Juara 227 TP PKK Desa 42 Kec 100 Orang 1316 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 1 Juara	18 Juara 421 TP PKK Desa 42 Kecamatan 300 Orang 3948 Orang 84 Orang 42 TP PKK Kab 40 TP PKK Kab 13Juara	300
---	----	----	------	----	---	--	--	--	--	--	-----	--	---	-----

SUMBER : LAPORAN TRIWULAN II DPMD TAHUN 2022



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut tahun 2023 permasalahan yang muncul saat ini perlu diidentifikasi secara komprehensif, agar hambatan yang mendesak dalam pengelolaan pendapatan dan keuangan dapat diselesaikan. Dengan demikian, rencana kerja dapat tepat sasaran dan mampu menjawab semua permasalahan nyata yang sedang dan yang akan dihadapi.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut mencakup **Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** yang dilaksanakan pada tahun sebelum penyusunan Renja (Tahun 2021) mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 serta telah mengalami beberapa revisi disesuaikan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permen 13 Tahun 2006 .

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut telah melaksanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan target kinerja pada dokumen RENSTRA yang dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 meliputi 5 Program, 11 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan total anggaran belanja sebesar Rp.21.380.880.749,00 (*Dua*



*Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.20.281.397.120,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).*

Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021, seluruh program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 telah terlaksana dengan baik dan seluruh kegiatan masuk kategori "**efektif**" dan "**efisien**" dan terukur.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan SKPD tahun 2021 sebagai bahan rencana tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana tabel pada halaman berikut.





**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang			94,77%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			83,070	84,013	85,006	86,019	82,954	84,429	85,006	86,019	

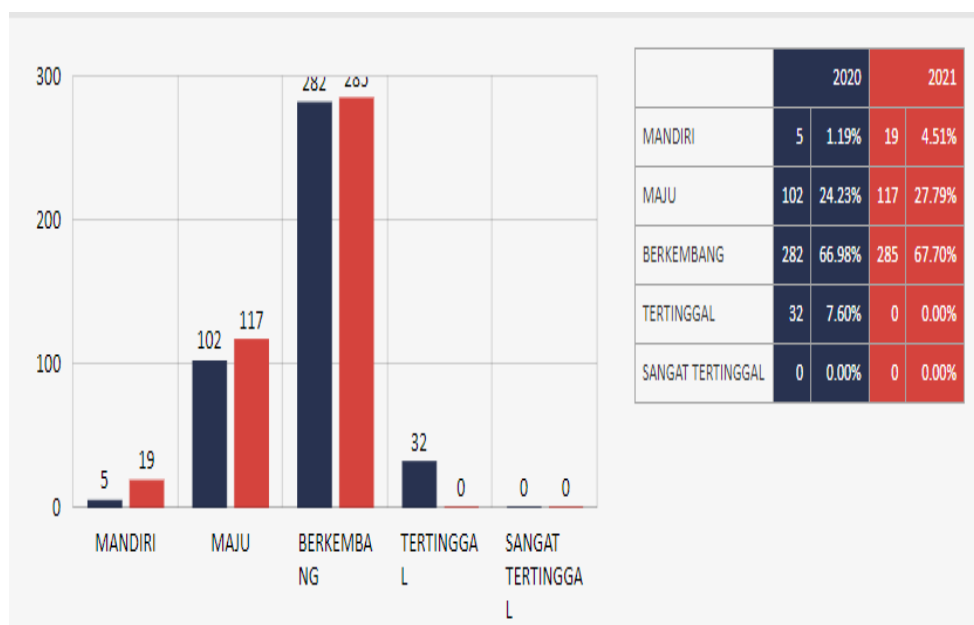
SUMBER : PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Indeks Desa membangun, Kondisi 421 Desa di Kabupaten Garut berdasarkan **Indeks Desa Membangun (IDM)** tersebut terpetakan sebagai berikut :

**Gambar 2.3**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Desa Membangun (IDM)**  
**dengan Target Tahun 2021**



SUMBER: IDM KABUPATEN GARUT TAHUN 2021

Melihat kondisi di Kabupaten Garut yaitu pada tahun 2021 terdapat 421 Desa yang terdiri dari 19 Desa Mandiri, 117 Desa Maju dan 285 Desa Berkembang Desa. Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan



Desa Kabupaten Garut maka yang menjadi isu penting adalah bagaimana mengungkit status desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju menjadi desa mandiri. Perkembangan yang cukup signifikan bahwa sejak tahun 2021 di Kabupaten Garut sudah tidak ada lagi Desa Tertinggal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

- Partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum optimal.
- Belum optimalnya peran lembaga sosial budaya masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- Belum optimalnya pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat.
- Belum optimalnya pengembangan potensi ketahanan dan sosial budaya masyarakat.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perekonomian desa.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Lemahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi.



- Adanya kesenjangan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing kawasan.
- Belum optimalnya penggalan dan pendayagunaan dana desa untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- Belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi SDA lokal.
- Rendahnya kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.
- Belum optimalnya peran kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna perdesaan.
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Belum terpenuhinya jumlah perangkat Desa dan Kelurahan yang memenuhi persyaratan.
- Belum tersedianya tanah kas Desa.
- Belum optimalnya penegasan batas antar desa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.



- Belum optimalnya Pembangunan Desa yang berbasis Pemberdayaan Masyarakat.
- Belum optimalnya pengembangan potensi pembangunan Kawasan Perdesaan.
- Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kelurahan.

#### Dampak

- Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
- Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.

Tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut dalam meningkatkan pelayanan antara lain :

- Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
- Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa

tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.

- Kualitas SDM belum optimal.
- Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
- Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- Masih perlunya pengembangan pembangunan Desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan pembangunan antar Desa.
- Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam dan TTG.

Peluang dalam peningkatan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kabupaten Garut yang berasal dari internal dan bisa di kontrol (*Controllable*) adalah :

- Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
- Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.



- Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sebagai upaya mewujudkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan desa, telah disusun rencana program kegiatan tahun 2023 yang terdiri dari 5 program dan 12 kegiatan serta 53 Sub kegiatan.

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Perangkat Daerah. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas dan fungsi DPMD Kabupaten Garut. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah dengan prediksi pagu anggaran indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2023 telah disusun pada bulan Februari 2022. Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 terdapat 1 nomenklatur program non urusan dengan 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan serta program teknis dengan 4 program, 4 kegiatan dan 25 sub kegiatan yang dicantumkan dalam RENJA DPMD, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :





- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - ii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
  - iii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD.
  - iv. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
  - v. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - vi. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - vii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - ii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- i. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
  - ii. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.



- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - iii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - iv. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - v. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
  - vi. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - vii. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- i. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - ii. Pengadaan Mebel.
  - iii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - iv. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
  - v. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :



- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
    - ii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
    - iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
    - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
    - ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penataan Desa, dengan kegiatan :
  - a. Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan sub kegiatan :
    - i. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
    - ii. Fasilitasi Tata Wilayah Desa.
    - iii. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa.
    - iv. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa.
    - v. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota.
    - vi. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan kegiatan :
  - a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, dengan sub kegiatan :



- i. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota.
  - ii. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :
- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan :
    - i. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
    - ii. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
    - iii. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
    - iv. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
    - v. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
    - vi. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.
    - vii. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
    - viii. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.
    - ix. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
    - x. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.



xi. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :

a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :

i. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

ii. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

iii. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.



- iv. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- v. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
- vi. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.



**TABEL 2.5**  
**RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2023**  
**KABUPATEN GARUT**

**Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GARUT**

No	Rancangan Awal RKPd				Pagu Indikatif (Rp.)	Hasil Analisis Kebutuhan				Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>85,006</b>	<b>13.594.505.355</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</b>	<b>85,006</b>	<b>13.594.505.355</b>	
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>195.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>195.000.000</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	35.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	35.000.000	
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	105.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	105.000.000	
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>5.152.781.355</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>5.152.781.355</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Garut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.127.781.355	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Garut	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	5.127.781.355	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>272.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur DPMD</b>	<b>100%</b>	<b>272.000.000</b>
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	72.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	72.000.000
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Garut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Garut	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang	200.000.000
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>721.500.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>721.500.000</b>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.000.000
1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	55.000.000
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.000.000
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	150.000.000
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	321.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	321.500.000
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	10.000.000
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>6.268.224.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>6.268.224.000</b>
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	1.180.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit	1.180.000.000
1.6.2	Pengadaan Mebel	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	230 Unit	788.224.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Garut	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	230 Unit	788.224.000





RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	250.000.000
1.6.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4.000.000.000
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik</b>	<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000
1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	25.000.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	225.000.000
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>435.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>435.000.000</b>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Garut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Garut	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	100.000.000
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	335.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Garut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	335.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas</b>	<b>15%</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>		<b>Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas</b>	<b>15%</b>	<b>4.900.000.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		<b>Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa</b>	<b>100%</b>	<b>3.900.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>		<b>Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa</b>	<b>100%</b>	<b>4.900.000.000</b>
2.1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	32 Desa	250.000.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	32 Desa	1.250.000.000
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	261 Desa	3.000.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	261 Desa	3.000.000.000
2.1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	250 Desa	200.000.000	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	250 Desa	200.000.000
2.1.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi P dan Kode Desa	421 Desa	200.000.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Terfasilitasi P dan Kode Desa	421 Desa	200.000.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2.1.5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	50.000.000
2.1.6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	200.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	1 Unit	200.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin</b>	<b>2,78%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>		<b>Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin</b>	<b>2,78%</b>	<b>750.000.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>		<b>Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya</b>	<b>38,16%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>		<b>Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya</b>	<b>38,16%</b>	<b>750.000.000</b>
3.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350.000.000
3.1.2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	400.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel</b>	<b>80%</b>	<b>10.563.128.000</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel</b>	<b>80%</b>	<b>24.119.042.000</b>
<b>4.1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>10.563.128.000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>		<b>Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>24.119.042.000</b>
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	365.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	365.000.000
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	370.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	370.000.000
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	100.000.000
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	4771 Orang	6.427.276.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	4771 Orang	9.983.190.000
4.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1.000.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	11.000.000.000
4.1.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1.120.852.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	1.120.852.000
4.1.8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	260.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	260.000.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

4.1.9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	150.000.000	
4.1.1.0	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	250.000.000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	15 Desa	250.000.000	
4.1.1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	420.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	420.000.000	
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>8.325.000.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>		<b>Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan</b>	<b>100%</b>	<b>8.325.000.000</b>	
<b>5.1</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan</b>	<b>11%</b>	<b>8.325.000.000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan</b>	<b>11%</b>	<b>8.325.000.000</b>	
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.300.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.300.000.000	
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Garut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	2.155.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Garut	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	2.155.000.000	
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1.500.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1.500.000.000	
5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	800.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	800.000.000	
5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	320.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Garut	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	320.000.000	
5.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.250.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Garut	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.250.000.000	
					<b>37.132.633.355</b>						<b>51.688.547.355</b>

SUMBER : SIPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2023



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 disusun sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024. Dalam hal ini renstra telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Penyusunan program dan kegiatan ini senantiasa memperhatikan capaian pembangunan saat ini, mempertimbangkan permasalahan serta isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya, penyusunan program kegiatan ini didasarkan atas masukan dari berbagai pihak yang difasilitasi melalui forum musrenbang baik tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.

Usulan para pemangku kepentingan melalui beberapa kegiatan diantaranya Konsultasi Publik, Forum OPD di berbagai tingkatan, Musrenbang di berbagai tingkatan juga hasil reses dan pokok pikiran DPRD. Pengakomodiran usulan para pemamngku kepentingan tersebut dengan memperhatikan :

- Kesesuaian dengan kewenangan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Dapat diakomodir oleh Desa karena merupakan bagian dari kewenangan desa sebagaimana yang tertera dalam



peraturan/ perundang-undangan yang berlaku dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Provinsi dan lain-lain.

- Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) sebagaimana berkaitan dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- Lokasi dan alokasi hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sementara pertimbangan calon lokasi dengan mempertimbangkan target dan sasaran di tingkat Kabupaten, anggaran yang disetujui oleh TAPD, dapat mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat di desa terkait, selaras dengan program/kegiatan pusat dan atau provinsi, dapat meningkatkan perekonomian desa dan hasil survey serta analisa.



**TABEL 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Garut**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>  Penyelenggaraan Penataan Desa				
		jl. desa sindang palay rt 01 Karangpawitan Sindangpalay rw 06, Kab. Garut	Optimalisasi pengelolaan desa wisata	1 paket	
		kp. babakan, Kab. Garut Karangpawitan Sindanggalih	Optimalisasi pengelolaan desa wisata	1 paket	
		mekarmulya, Kab. Garut Malangbong Mekarmulya	Optimalisasi pengelolaan desa wisata	1 unit	
		Kantor Desa Cigedug, Kab. Garut Cigedug Cigedug	Pembentukan/Pemekaran Desa	1 Desa	
		Mandalasari, Kab. Garut Kadungora Mandalasari	Optimalisasi pengelolaan desa wisata	1 Paket	
		KOTA KULON RW 021 GARUT KOTA, Kab. Garut Garut Kota Kota Kulon	Optimalisasi pengelolaan desa wisata	1 Paket	
2	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
		kp. sukamulya, Kab. Garut Malangbong Karangmulya	Hibah Barang (BUMDes)	1 unit	
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>  Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
		Desa Simpen Kaler, Kab. Garut Bl. Limbangan Simpen Kaler	Insentif Dasawisma	300 per orang	
		Desa Simpen Kidul, Kab. Garut Bl. Limbangan Simpen Kidul	Insentif Dasawisma	300.000 per orang	
		Kp. Ikar, RT 03/RW 03, Kab. Garut Bl. Limbangan Pasirwaru	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 100.000.000	
		jalan raya cisompet, Kab. Garut Cisompet Sindangsari	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 kelompok	
		Kp. Cipeucang, Kab. Garut Sukawening Sukawening	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Kelompok	
		Kp. Mulabaruk, Kab. Garut Sukawening Sukawening	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Kelompok	
		Kp. Ciluar RW 07, Kab. Garut Pangatikan Sukarasa	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 Set	



		RW 10, Kab. Garut	Pangatikan	Babakan Loa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	10 Kelompok	
		Kp Cipari, Kab. Garut	Pangatikan	Sukarasa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Kelompok	
		Kp Cipari RW 06, Kab. Garut	Pangatikan	Sukarasa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Kelompok	
		Kp. Cibuntu, Kab. Garut	Pangatikan	Sukahurip	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 Unit	
		Kp. Jati, Kab. Garut	Karangpawitan	Situgede	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 25.000.000	
		Kp. Lengkong, Kab. Garut	Karangpawitan	Sindangpalay	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	Rp. 50.000.000	
		Kp. Kertamanah, Kab. Garut	Karangpawitan	Cimurah	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 15.000.000	
		RW. 010, Kab. Garut	Garut Kota	Ciwalen	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 25.000.000	
		JL CIKERIS RT/RW 02/10, Kab. Garut	Cikajang	Cikandang	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Paket	
		JL RAYA CIKANDANG MARGAMULYA NO 256, Kab. Garut	Cikajang	Cikandang	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 Paket	
		KP DESA KOLOT RW 08, Kab. Garut	Cikajang	Cikandang	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 Paket	
		KP CIPAKU RW 06, Kab. Garut	Cikajang	Cikandang	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 Paket	
		Jin. Karangtengah No. 69 Kp. Negla, Kab. Garut	Karangtengah	Caringin	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	1 Lembaga	
		Kp. Cihanja RT 02 RW 07, Kab. Garut	Karangtengah	Caringin	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	1 Lembaga	
		Jl. Sukalilah No. 01, Kab. Garut	Karangtengah	Sindanggalih	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	1 Lembaga	
		Jin. Nagrog, Kab. Garut	Karangpawitan	Sindanggalih	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	1 Lembaga	
		Kp. Cihanja RT 01 RW 08, Kab. Garut	Karangtengah	Caringin	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	3 Unit	
		Kp. Cipajaran RW 01, Kab. Garut	Kadungora	Cikembulan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 Paket	
		Kp. Cipajaran RW 01, Kab. Garut	Kadungora	Cikembulan	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Paket	
		Desa Cibatu, Kab. Garut	Cibatu	Cibatu	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	1 Paket	



		Desa Cisaat, Kab. Garut	Kadungora	Cisaat	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Paket	
		Desa Kadungora, Kab. Garut	Kadungora	Kadungora	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Paket	
		Desa Karang Tengah, Kab. Garut	Kadungora	Karantengah	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Paket	
		Desa Haruman, Kab. Garut	Leles	Haruman	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Paket	
		Desa Lingkung Pasir, Kab. Garut	Cibiuk	Lingkungpasir	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Paket	
		Kec. Kadungora, Kab. Garut	Kadungora	Seluruh Kelurahan/Desa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	50 Orang	
		Kec. Leuwigoong, Kab. Garut	Leuwigoong	Seluruh Kelurahan/Desa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	50 Orang	
		Desa Pasirwaru, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Kelompok	
		Kp. Panggilan, Kab. Garut	Pasirwangi	Pasirwangi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 unit	
		perum cempaka no 24 rt 003 rw 007, Kab. Garut	Karangpawitan	Suci	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 paket	
		Kp. Sompok, Kab. Garut	Banyuresmi	Sukaratu	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 Set	
		kp. sindang 9toko uly), Kab. Garut	Banjarwangi	Kadongdong	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 paket	
		kp. pasirpogor, Kab. Garut	Seluruh Kecamatan	Banjarwangi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 barang	
		kp. banjarwangi, Kab. Garut	Banjarwangi	Banjarwangi	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 paket	
		Kp. Sindang Heula, Kab. Garut	Banjarwangi	Bojong	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 paket	
		JALAN KAMPUNG HANJUANG RT. 01 RW. 01, Kab. Garut	Bungbulang	Hegarmanah	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Paket	
		KP BARUKAL, DS CISURUPAN, KEC CISURUPAN, Kab. Garut	Cisurupan	Cisurupan	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	100 orang	
		Desa Pasawahan, Kelurahan Pananjung, Desa Jati, dan Desa Langensari, Kab. Garut	Tarogong Kaler	Pasawahan	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	200 Orang	
		kp. Tegal jambu, Kab. Garut	Tarogong Kaler	Pananjung	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 100.000.000	
		kp. Cipanas, Kab. Garut	Tarogong Kaler	Pananjung	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 50.000.000	





	desa pasawahan, desa jati, desa langensari dan kelurahan pananjung, Kab. Garut	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 300.000.000	
	Desa rancabango, Kab. Garut	Tarogong Kaler	Rancabango	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 50.000.000	
	Perum Pesona Intan RW 011, Desa Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler, Garut, Kab. Garut	Tarogong Kaler	Sirnajaya	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	1 Unit Gedung	
	Kp. Cipanas RT. 01 RW. 04, Pasirwangi Ds. Karyamekar, Pasirwangi, Garut., Kab. Garut		Karyamekar	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Bantuan Modal Usaha	
	Kp. Lengkong Kaler, RT.03 RW.02, Ds. Samarang, Garut, Kab. Garut	Samarang	Samarang	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Peternakan Telur Puyuh	
	Kp. Areng Panarikan RW 007, Kab. Garut	Cikajang	Cikajang	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	20 Orang	
	Desa Cigedug RW 001 - RW 014, Kab. Garut	Cigedug	Cigedug	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	200 Orang	
	Desa Canguang, Kab. Garut	Leles	Canguang	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	100 unit	
	Jayaraga, Kab. Garut	Tarogong Kidul	Jayaraga	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Kelompok	
	Citeras, Kab. Garut	Malangbong	Citeras	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Kelompok	
	Karangtengah, Kab. Garut	Kadungora	Karangtengah	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset dll)	1 Kelompok	
	Kp. Tarikolot, Kab. Garut	Cilawu	Mangurakyat	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	1 Kelompok	
	kp. Cibolerang, Kab. Garut	Karangpawitan	Karangsari	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	Karangpawitan, Kab. Garut	Karangpawitan	Karangpawitan	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	cimurah, Kab. Garut	Karangpawitan	Cimurah	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	Jatisari, Kab. Garut	Karangpawitan	Jatisari	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	Sindanglaya, Kab. Garut	Karangpawitan	Sindanglaya	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	Situsaeur, Kab. Garut	Karangpawitan	Situsaeur	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	Situjaya, Kab. Garut	Karangpawitan	Situjaya	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	Sukamenak, Kab. Garut	Wanaraja	Sukamenak	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	



		Sindanggalih, Kab. Garut	Karangpawitan	Sindanggalih	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	
		Tanjungsari, Kab. Garut	Karangpawitan	Tanjungsari	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	
		Sadang, Kab. Garut	Sucinaraja	Sadang	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	
		Cigadog, Kab. Garut	Sucinaraja	Cigadog	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	
		Citangtu, Kab. Garut	Pangatikan	Citangtu	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	
		rizki m abdul kudas - Kp.bojong rt.04 rw.15, Kab. Garut	Garut Kota	Cimuncang	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	5.000.000	
		KELOMPOK USAHA MITRA MANFAAT - Kp. Tengger Rt 001 Rw 011, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Rp.	20.000.000	
		MASYARAKAT - Kp. Kudang Rt 004 Rw 003, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	
		POKTER P3C - Kp. Ciputat Rt 001 Rw 006, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	
		POKHA SAWARGI JAYA - Kp. Tengger Rt 01 Rw 010, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Cigagade	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	
		POKHA MAJU MAKMUR - Kp. Rancaciung Rt 003 Rw 006, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Neglasari	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Rp.	25.000.000	
		POKTAN HARAPAN MAJU 5 - Kp. Pojok Rt 002 Rw 005, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Rp.	25.000.000	
		POKHA BARAYA - Kp. Rancapanjang Rt 002 Rw 008, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Neglasari	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	10.000.000	
		R UBANG WIRABANGSA - Kp. Ciputat Rt 002 Rw 006, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	5.000.000	
		IDA PATONAH - Kp. Cijambe Rt 002 Rw 006, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Tengah	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	5.000.000	
		TOKO CAHAYA AGUNG - Kp. Sawah Bera Rt 002 Rw 004, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Barat	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	5.000.000	
		POKHA KIM BOBA - Kp. Sukasirna Rt 001 Rw 004, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	5.000.000	
		POKHA SEBLAK SAWAH - Kp. Cimanjah Rt 001 Rw 003, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	5.000.000	
		POKHA WARUNG NAJMI - Kp. Cilaja Rt 002 Rw 005, Kab. Garut	Seluruh Kecamatan	Limbangan Timur	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp.	5.000.000	
		POKHA SAKILA JAYA - Kp. Galeuh Pakuwon Rt 002 Rw 008, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Galihpakuwon	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Rp.	25.000.000	



	TEH IMAS SYAMSIYAH - Kp. Sukasirna Rt 003 Rw 008, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 5.000.000	
	POHA MEKAR JAYA - Kp. Cibadak Rt 002 Rw 006, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	POKTAN TEGUH JAYA MANDIRI - Kp. Saapan Rt 003 Rw 007, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Galihpakuwon	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Rp. 100.000.000	
	IMAM ABDUL KARIM - Kp. Cimanjah Rt 003 Rw 007, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Timur	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	KELOMPOK TANI DARUL GONAM - Kp. Cijambe Rt 001 Rw 006, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Limbangan Tengah	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 50.000.000	
	YAYANG HERIYANA - Kp. Cibadak 1 Rt 002 Rw 006, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Pasirwaru	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	POKHA BERKAH JAYA ABADI - Kp. Lebak Jaya Rt 004 Rw 004, Kab. Garut	Bl. Limbangan	Ciwangi	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 25.000.000	
	KELOMPOK TANI MEKAR TANI - Kp. Cipendeuy Kaler Rt 003 Rw 002, Kab. Garut	Kadungora	Karangtengah	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Rp. 50.000.000	
	POKTAN SATUHU - Kp. Cilanjung Rt 003 Rw 007, Kab. Garut	Selaawi	Selaawi	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Rp. 25.000.000	
	POKHA MAKMUR JAYA MANDIRI - Kp. Cirapuhan Rt 001 Rw 011, Kab. Garut	Selaawi	Cirapuhan	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	POKTAN WANITA [KWT] DAWUNG LESTARI - Kp. Sawah Tengah Rt 002 Rw 006, Kab. Garut	Selaawi	Samida	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 25.000.000	
	POKHA CAFE ARFA - Kp. Jeungjing Rt 003 Rw 002, Kab. Garut	Selaawi	Pelitaasih	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 50.000.000	
	POKHA JAYA MANDIRI - Kp. Cisanyoh Rt 002 Rw 004, Kab. Garut	Selaawi	Pelitaasih	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 15.000.000	
	BAKTI TANI - Kp. Cibarugbug Rt 001 Rw 006, Kab. Garut	Kersamanah	Girijaya	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 5.000.000	
	POKHA BAROKAH - Kp. Cilebak Rt 002 RW 006, Kab. Garut	Kersamanah	Mekarraya	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 5.000.000	
	WARUNG IMA - Kp. Kurnia Rt 003 Rw 001, Kab. Garut	Kersamanah	Kersamanah	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 5.000.000	
	KELOMPOK PERTANIAN SAYURAN - Kp. Cigalumpit 2 Rt 001 Rw 010, Kab. Garut	Cibatu	Sindangsuka	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Rp. 25.000.000	
	POKTAN SAWARGI - Kp. Pasir Cibolang Rt 001 Rw 001, Kab. Garut	Leuwigoong	Karanganyar	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	Rp. 25.000.000	
	Kp.serang, Kab. Garut	Selaawi	Cigawir	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 10.000.000	
	Jl. Pamoyanan RT 02 RW 01, Kab. Garut	Tarogong Kidul	Sukagalih	Hibah Uang untuk Pembangunan Sekretariat RT dan RW	50 M²	



	kp. Nagrog Rw 03, Kab. Garut	Pamulihan	Pananjung	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	5 unit	
	desa Pananjung kec Pamulihan, Kab. Garut	Pamulihan	Pananjung	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	Rp. 100.000.000	
	kp.pakenjeng RT/RW 03/01, Kab. Garut	Pamulihan	Pakenjeng	Hibah Barang Untuk Usaha Ekonomi Masyarakat (Berupa Bantuan Mesin, Bantuan Genset Dll)	5 unit	
	JL. CIPARAY, Kab. Garut	Karangpawitan	Lebakjaya	Hibah Uang/Bantuan Modal Usaha untuk usaha ekonomi masyarakat	100 Orang	

SUMBER : SIPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema “peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada 7 arah kebijakan prioritas RKP Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP tahun 2023 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut

terdapat pada Prioritas ke-1, yaitu “Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global”, dengan arah kebijakan yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun Kebijakan Pemerintah Kabupaten Garut berdasarkan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, dengan tema “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah Serta Penguatan Demokrasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat “.

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2023, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 mendukung secara tidak langsung Prioritas Pembangunan Nasional maupun Kabupaten Garut. Adapun Program Prioritas Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Nasional adalah Program Penataan Desa, Program Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut mengacu pada

Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Garut dalam RKP dan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan kualitas penataan desa.
2. Penguatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan.
3. Penguatan kapasitas pemerintahan desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2019-2024, tujuan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah “ Meningkatkan kemajuan pembangunan desa ” .

Untuk mencapai tujuan pembangunan DPMD tersebut, maka disusunlah sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah desa yang meningkat status pembangunannya.
2. Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD.





**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Satuan	Realisasi		Target 2023	Target 2024
				2021	2022		
1 Meningkatkan kemajuan pembangunan desa		Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	%	100	100	100	100
	1	Meningkatnya jumlah desa yang meningkat status pembangunannya	%	100	100	100	100
	2	Meningkatnya kapasitas kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,954	84,429	85,006

SUMBER: PERUBAHAN RENSTRA DPMD KAB. GARUT TAHUN 2019-2024

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Tahun 2023. Renja DPMD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPMD (RKA DPMD) Tahun 2023.

Di dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 yang telah disusun dan dibahas dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Garut memuat 5 program, 12 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Garut pada 1 (satu) tahun ke depan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 51.688.547.355,-** berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2024. Untuk itu seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten garut yang menjadi ruang lingkup DPMD dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.



Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

i. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

viii. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

ix. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

x. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD.

xi. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

xii. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

xiii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

xiv. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

j. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

iii. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

iv. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

k. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

ii. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
  - ii. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- m. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - viii. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - ix. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - x. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - xi. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - xii. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
  - xiii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - xiv. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- n. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - i. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - ii. Pengadaan Mebel.
  - iii. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - iv. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- v. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- o. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - iv. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - v. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - vi. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- p. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - iii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - iv. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tujuan program ini adalah terpenuhinya fasilitas kebutuhan untuk menunjang pelayanan administrasi perkantoran. Melalui program ini diharapkan pelayanan administrasi perkantoran dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 13.594.505.355,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Rincian Anggaran  
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota  
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	13.594.505.355	
Jumlah		13.594.505.355	

SUMBER: SIPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

7. Program Penataan Desa, dengan kegiatan :

a. Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan sub kegiatan :

- vii. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa.
- viii. Fasilitasi Tata Wilayah Desa.
- ix. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa.
- x. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa.
- xi. Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- xii. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa.

Tujuan program ini adalah terselenggaranya penataan desa dengan baik. Melalui program ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 4.900.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 3.3. Rincian Anggaran  
Program Penataan Desa  
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	4.900.000.000	
Jumlah		4.900.000.000	

SUMBER: SIPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

8. Program Peningkatan Kerjasama Desa, dengan kegiatan :
- b. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa, dengan sub kegiatan :
    - iii. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga  
Dalam Kabupaten/Kota.
    - iv. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Tujuan program ini adalah terlaksananya kerjasama antar desa. Melalui program ini diharapkan tercapainya peningkatan kerjasama antar desa. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 750.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 3.4. Rincian Anggaran  
Program Peningkatan Kerjasama Desa  
Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	750.000.000	
Jumlah		750.000.000	

SUMBER: SIPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

9. Program Administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan

:

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan :

- xii. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- xiii. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa.
- xiv. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.
- xv. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- xvi. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
- xvii. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa.
- xviii. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- xix. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa.



- xx. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.
- xxi. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- xxii. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

Tujuan program ini adalah terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa. Melalui program ini diharapkan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 24.119.042.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.5. Rincian Anggaran Program Administrasi Pemerintahan Desa Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	24.119.042.000	
Jumlah		24.119.042.000	

SUMBER: SIPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2023



10. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :
  - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
    - vii. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
    - viii. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
    - ix. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
    - x. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
    - xi. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

- xii. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Tujuan program ini tercapainya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sesuai yang direncanakan. Melalui program ini diharapkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Total alokasi anggaran program ini sebesar Rp. 8.325.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6. Rincian Anggaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Sumber Dana**

No	Sumber Dana	Anggaran (Rp)	Ket
1	APBN	-	
2	APBD Provinsi	-	
3	APBD Kabupaten	8.325.000.000	
Jumlah		8.325.000.000	

SUMBER: SIPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana tabel 3.7. berikut :



**TABEL 3.7**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DPMD TAHUN 2023**  
**DAN PERKIRAAAN MAJU TAHUN 2024**  
**KABUPATEN GARUT**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				51.688.547.355				33.797.257.355
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat</b>		<b>85,006</b>	<b>13.594.505.355</b>			<b>86,019</b>	<b>11.263.281.355</b>
<b>1.1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan serta dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>195.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>220.000.000</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	5 Dokumen	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Dokumen	40.000.000
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Garut	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Garut	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Garut	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Garut	1 Dokumen	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	5.000.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Garut	4 Laporan	35.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	35.000.000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Garut	5 Laporan	105.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Laporan	125.000.000
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan gaji dan tunjangan ASN serta dokumen laporan keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>		<b>100%</b>	<b>5.152.781.355</b>			<b>100%</b>	<b>5.152.781.355</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Garut	43 Orang/bulan	5.127.781.355	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		43Orang/bulan	5.127.781.355
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Garut	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	25.000.000
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan pengamanan barang milik daerah</b>		<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>150.000.000</b>
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Garut	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tingkat pemenuhan disiplin aparatur DPMD</b>		<b>100%</b>	<b>272.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>274.000.000</b>
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kabupaten Garut	3 Paket	72.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	74.000.000
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Garut	75 Orang	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		75 Orang	200.000.000
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani dengan Baik</b>		<b>100%</b>	<b>721.500.000</b>			<b>100%</b>	<b>741.500.000</b>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Garut	1 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Paket	25.000.000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Garut	4 Paket	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Paket	160.000.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Garut	2 Paket	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	60.000.000
1.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kabupaten Garut	2 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	15.000.000
1.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Garut	12 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	150.000.000
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Garut	12 Laporan	321.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	321.500.000
1.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Garut	1 Dokumen	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	10.000.000
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik</b>		<b>100%</b>	<b>6.268.224.000</b>			<b>100%</b>	<b>4.100.000.000</b>
1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Garut	9 Unit	1.180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	40.000.000
1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Garut	230 Unit	788.224.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Unit	40.000.000
1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Garut	2 Unit	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	10.000.000
1.6.4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Garut	1 Unit	4.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	4.000.000.000
1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Garut	10 Unit	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Unit	10.000.000
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa bagi unit kerja internal dengan pelayanan Baik</b>		<b>100%</b>	<b>400.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>235.000.000</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Garut	12 Laporan	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	75.000.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

1.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Garut	1 Laporan	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	10.000.000
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Garut	12 Laporan	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	150.000.000
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur</b>		<b>100%</b>	<b>435.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>390.000.000</b>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Garut	29 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		29 Unit	40.000.000
1.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Garut	1 Unit	335.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	350.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas</b>		<b>15%</b>	<b>4.900.000.000</b>			<b>15%</b>	<b>3.900.000.000</b>
<b>2.1</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	<b>Persentase pemerintah desa yang telah menyelenggarakan penataan desa</b>		<b>100%</b>	<b>4.900.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>3.900.000.000</b>
2.1.1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kabupaten Garut	32 Desa	1.250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		32 Desa	250.000.000
2.1.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Kabupaten Garut	261 Desa	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		261 Desa	3.000.000.000
2.1.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Kabupaten Garut	250 Desa	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		250 Desa	200.000.000
2.1.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi P dan Kode Desa	Kabupaten Garut	421 Desa	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		421 Desa	200.000.000
2.1.5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	1 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	50.000.000
2.1.6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Garut	1 Unit	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	200.000.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin</b>		<b>2,78%</b>	<b>750.000.000</b>			<b>2,78%</b>	<b>750.000.000</b>
<b>3.1</b>	<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>	<b>Persentase desa yang terfasilitasi kerjasamanya</b>		<b>38,16%</b>	<b>750.000.000</b>			<b>38,16%</b>	<b>750.000.000</b>
3.1.1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kabupaten Garut	1 Dokumen	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	350.000.000
3.1.2	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kabupaten Garut	1 Dokumen	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	400.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel</b>		<b>80%</b>	<b>24.119.042.000</b>			<b>80%</b>	<b>10.212.276.000</b>
<b>4.1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan</b>		<b>100%</b>	<b>24.119.042.000</b>			<b>100%</b>	<b>10.212.276.000</b>
4.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kabupaten Garut	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	310.000.000
4.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kabupaten Garut	1 Dokumen	365.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	365.000.000
4.1.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kabupaten Garut	1 Dokumen	370.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	370.000.000
4.1.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kabupaten Garut	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	310.000.000
4.1.5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kabupaten Garut	4771 Orang	9.983.190.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4771 Orang	6.642.276.000
4.1.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kabupaten Garut	1 Dokumen	11.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.000.000.000
4.1.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kabupaten Garut	1 Laporan	1.120.852.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0





RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

4.1.8	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kabupaten Garut	1 Dokumen	260.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	265.000.000
4.1.9	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasi Pengelolaan Aset Desa	Kabupaten Garut	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	450.000.000
4.1.10	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Kabupaten Garut	15 Desa	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Desa	250.000.000
4.1.11	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kabupaten Garut	1 Dokumen	420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	250.000.000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan</b>		<b>100%</b>	<b>8.325.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>7.671.700.000</b>
<b>5.1</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang telah diberdayakan</b>		<b>11%</b>	<b>8.325.000.000</b>			<b>11%</b>	<b>7.671.700.000</b>
5.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kabupaten Garut	1 Dokumen	2.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	2.300.000.000
5.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Garut	6 Lembaga	2.155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Lembaga	2.155.000.000
5.1.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kabupaten Garut	1 Dokumen	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	950.000.000
5.1.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kabupaten Garut	1 Laporan	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	651.700.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

5.1.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kabupaten Garut	1 Laporan	320.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	330.000.000
5.1.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasi Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten Garut	1 Dokumen	1.250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1.285.000.000
					<b>51.688.547.355</b>				<b>33.797.257.355</b>

SUMBER : SIPD KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2023 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Bagi satuan kerja pelaksana program, Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi



kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.



**TABEL 4.1**  
**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Garut**  
**Tahun 2023**

**Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					51.688.547.355		33.797.257.355					
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.594.505.355		11.263.281.355					
2	13	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					195.000.000		220.000.000					
2	13	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	5 Dokumen	85.006 Poin	35.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	40.000.000
2	13	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Dokumen	85.006 Poin	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.000.000
2	13	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Dokumen	85.006 Poin	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.000.000
2	13	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Dokumen	85.006 Poin	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.000.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Dokumen	85.006 Poin	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.000.000	
2	13	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	4 Laporan	85.006 Poin	35.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	35.000.000	
2	13	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	5 Laporan	85.006 Poin	105.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	125.000.000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									<b>5.152.781.355</b>				<b>5.152.781.355</b>
2	13	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	49 Orang/ bulan	85.006 Poin	5.127.781.355	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	5.127.781.355	
2	13	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Laporan	85.006 Poin	25.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	25.000.000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									<b>150.000.000</b>				<b>150.000.000</b>
2	13	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Dokumen	85.006 Poin	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	150.000.000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									<b>272.000.000</b>				<b>274.000.000</b>



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	3 Paket	85.006 Poin	72.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	74.000.000
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	75 Orang	85.006 Poin	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	200.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>721.500.000</b>				<b>741.500.000</b>
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Paket	85.006 Poin	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	25.000.000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	4 Paket	85.006 Poin	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	160.000.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	2 Paket	85.006 Poin	55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	60.000.000
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	2 Dokumen	85.006 Poin	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	15.000.000
2	13	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	12 Laporan	85.006 Poin	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	150.000.000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	12 Laporan	85.006 Poin	321.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	321.500.000
2	13	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Dokumen	85.006 Poin	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	10.000.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>6.268.224.000</b>				<b>4.100.000.000</b>		
2	13	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	9 Unit	85.006 Poin	1.180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	40.000.000
2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	230 Unit	85.006 Poin	788.224.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	40.000.000
2	13	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	2 Unit	85.006 Poin	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	10.000.000
2	13	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Unit	85.006 Poin	4.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	4.000.000.000
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	10 Unit	85.006 Poin	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	10.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>400.000.000</b>				<b>235.000.000</b>		
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	12 Laporan	85.006 Poin	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	75.000.000
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Laporan	85.006 Poin	25.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	10.000.000
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	12 Laporan	85.006 Poin	225.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.00 6 Poin	150.000.000
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>435.000.000</b>				<b>390.000.000</b>		





RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	29 Unit	85.006 Poin	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	40.000.000	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85.006 Poin	1 Unit	85.006 Poin	335.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	85.006 Poin	350.000.000	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>								<b>4.900.000.000</b>					<b>3.900.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>								<b>4.900.000.000</b>						<b>3.900.000.000</b>
2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	32 Desa	00 %	1.250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	250.000.000	
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	261 Desa	100 %	3.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	3.000.000.000	
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	250 Desa	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	200.000.000	
2	13	02	2.01	04	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Desa yang Terfasilitasi P dan Kode Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	421 Desa	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	200.000.000	
2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	1 Laporan	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	50.000.000	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 %	1 Unit	100 %	200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang memiliki penataan desa berkualitas	15 %	200.000.000	



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>						<b>750.000.000</b>				<b>750.000.000</b>		
2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerja Sama antar Desa</b>						<b>750.000.000</b>				<b>750.000.000</b>		
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,78 %	1 Dokumen	100 %	350.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	2,78 %	350.000.000
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,78 %	1 Dokumen	100 %	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase peningkatan kerjasama desa yang terjalin	2,78 %	400.000.000
2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>						<b>24.119.042.000</b>				<b>10.212.276.000</b>		
2	13	04	2.01		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>						<b>24.119.042.000</b>				<b>10.212.276.000</b>		
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	310.000.000
2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	365.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	365.000.000
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	370.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	370.000.000
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	310.000.000
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	4771 Orang	100 %	9.983.190.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	6.642.276.000
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	11.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	1.000.000.000



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Laporan	100 %	1.120.852.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	0		
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Profil Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	260.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	265.000.000		
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasi Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	450.000.000		
2	13	04	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	15 Desa	100 %	250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	250.000.000		
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	Jumlah Dokumen Hasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	420.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemerintah desa yang memiliki tata kelola yang akuntabel	80 %	250.000.000		
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>									<b>8.325.000.000</b>					<b>7.671.700.000</b>	
<b>2</b>	<b>13</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									<b>8.325.000.000</b>						<b>7.671.700.000</b>
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	2.300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	2.300.000.000		



RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN 2023

2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Lembaga	100 %	2.155.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	2.155.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1.500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	950.000.000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	800.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	651.700.000
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	320.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	330.000.000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	00 %	1.250.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase desa yang Lembaga Kemasyarakatannya diberdayakan	100 %	1.285.000.000
<b>TOTAL</b>												<b>51.688.547.355</b>					<b>33.797.257.355</b>	

SUMBER:

SIPD

KABUPATEN

GARUT

TAHUN

2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut adalah Program Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut yang sesuai dengan Tugas Fungsi dan sasaran program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023, Rencana Kerja juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut. Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai tujuan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut.

## **5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD , Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

## **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

1. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



2. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan terwujud.

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**